

PROSPEK PENYELESAIAN MASALAH LIBANON

Kirdi DIPOYUDO

Pada 20 Oktober 1978 kontingen Arab Saudi dari Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab menggantikan pasukan-pasukan Suriah yang menduduki menara pencakar langit yang menguasai Ashrafiyah, daerah golongan Kristen di Beirut Timur, dan dua jembatan strategis yang merupakan tali penyelamat golongan itu. Penggantian pasukan itu bukan saja mengakhiri blokade Suriah terhadap daerah golongan Kristen tersebut tetapi juga mempunyai pengaruh psikologis yang besar dan segera meredakan ketegangan. Sebagai akibatnya genjatan senjata yang mengakhiri pertempuran sengit antara tentara Suriah dan milisia Kristen Libanon menjadi lebih mantab. Pergantian pasukan itu adalah bagian rencana perdamaian di Libanon yang dihasilkan Konferensi Menlu tujuh negara Arab yang dilangsungkan di Beit Eddine dekat Beirut pada 15-17 Oktober 1978 atas prakarsa Presiden Elias Sarkis. Namun dipersoalkan apakah rencana perdamaian itu akan lebih berhasil daripada rencana-rencana sebelumnya, termasuk rencana penyelesaian hasil KTT Arab terbatas di Riyadh Oktober 1976 yang dikukuhkan oleh KTT Arab di Kairo beberapa hari kemudian.

RENCANA PENYELESAIAN RIYADH GAGAL

Rencana penyelesaian masalah Libanon yang dihasilkan KTT Arab di Riyadh itu berhasil mengakhiri perang saudara di

ANALISA

Libanon yang berkobar sejak April 1975 dan menimbulkan harapan bahwa dalam waktu dekat sengketa antar golongan di negeri itu dapat diselesaikan secara damai, tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan. Kini, dua tahun kemudian, belum juga tercapai perdamaian. Pemerintah Libanon setengah lumpuh dan tidak berhasil menegakkan kekuasaannya atas seluruh negeri, antara lain karena belum berhasil membentuk suatu tentara nasional yang kuat. Golongan Kristen tetap menguasai wilayah mereka di Libanon Tengah dan Beirut Timur maupun di Libanon Selatan. Awal Oktober 1978 pasukan Suriah yang merupakan tulang punggung Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab bahkan terlibat dalam pertempuran sengit dengan bekas sekutu mereka, milisia Kristen. ¹

Bahwa masalah Libanon masih berlarut-larut untuk sebagian besar adalah akibat kegagalan pihak-pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan rencana perdamaian Riyadh itu. Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab yang berjumlah 30.000 orang dan diperlengkapi dengan ratusan tank dan artileri berat, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pasukan ini tidak berhasil mengumpulkan senjata-senjata berat golongan kanan Kristen maupun golongan kiri Muslim dan PLO, dan menjamin implementasi Persetujuan Kairo antara Libanon dan PLO yang pada intinya membatasi kebebasan gerak gerilyawan-gerilyawan Palestina. Sebagai akibatnya ketegangan antar golongan berlangsung terus. Milisia Kristen maupun milisia Muslim dan PLO bukan saja tidak mau menyerahkan senjata-senjata berat mereka sesuai dengan salah satu ketentuan rencana Riyadh, tetapi juga memanfaatkan genjatan senjata untuk mendatangkan senjata-senjata baru guna memperkuat kedudukan mereka masing-masing. Dalam keadaan serupa itu mereka menganggap sepi Pemerintah Presiden Sarkis. Golongan Kristen bahkan meningkatkan usaha-usaha mereka untuk melaksanakan rencana penyelesaian mereka sendiri. ²

1 Lihat karangan "Ruin is No Policy", *The Economist*, 14 Oktober 1978

2 Lihat Andre Liebich, "Lebanon, One Year After", *International Perspectives*, Januari-Februari 1978

Kecuali kelompok kecil bekas Presiden Franjeh yang mendukung rencana perdamaian Suriah, golongan Kristen memperjuangkan pembentukan negara Kristen tersendiri di wilayah yang mereka kuasai.³ Oleh sebab itu mereka menentang usaha-usaha untuk melaksanakan rencana penyelesaian KTT Riyadh yang didasarkan atas kesatuan, keutuhan wilayah dan kemerdekaan Libanon. Khususnya mereka menentang usaha Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Arab untuk memasuki dan menduduki wilayah mereka. Demikianpun mereka melawan usaha Pemerintah Presiden Sarkis untuk menegakkan kekuasaannya di seluruh negeri. Mereka menjadi lebih berani berkat dukungan dan bantuan Israel yang menginginkan pembentukan negara Kristen di sebelah utaranya, tidak hanya karena negara itu tidak akan memusuhinya seperti negara-negara tetangga Arab lainnya tetapi juga mengukuhkan haknya hidup sebagai kantong di dunia Arab Islam. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan pendirian negara-negara Arab yang menginginkan agar Libanon tetap satu dan Arab. Menurut perkiraan banyak pengamat itulah pokok kesulitan yang sejauh ini membuat kandas segala rencana penyelesaian.

MASALAH LIBANON

Untuk sebagian masalah Libanon itu bersumber pada komposisi rakyatnya dari kelompok Kristen dan kelompok Muslim yang hampir sama kuatnya, dan masing-masing pecah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kelompok Kristen mencakup umat-umat Kristen Maronit, Yunani Ortodoks, Yunani Katolik, Armenia Ortodoks, Armenia Katolik, Kristen Protestan dan beberapa kelompok kecil lainnya, sedangkan kelompok Muslim terdiri atas umat Muslim Sunni dan umat Muslim Shia yang hampir sama kuatnya dan umat Drus.² Umat Kristen Libanon itu merupakan suatu minoritas di dunia Arab yang berhasil mempertahankan agamanya terhadap usaha-usaha penguasa-penguasa Islam untuk mengislamkan penduduk negeri-negeri Kristen yang mereka tundukkan pada abad ke-VII. Te-

1 Lihat "Ruin is No Policy" *loc. cit.*

2 Lihat W.B. Fisher, "Lebanon", dalam *The Middle East and North Africa 1974-1975* (London, 1975), hal. 505

tapi di Libanon mereka merupakan mayoritas penduduk ketika negeri itu mendapatkan kemerdekaannya. Berdasarkan kenyataan itu kekuasaan dibagi antara golongan Kristen dan golongan Muslim dalam perbandingan enam lawan lima. Jabatan Presiden adalah untuk umat Kristen dan jabatan Perdana Menteri untuk umat Muslim. Dalam perang Arab-Israel 1948-1949 Libanon ikut berperang melawan Israel tetapi sejak itu berusaha menghindari keterlibatan dalam sengketa Arab-Israel. Selain itu golongan elitnya mempunyai hubungan erat dengan dunia Barat, terutama dengan Perancis yang sejak jaman Usmanli Turki menjadi Pelindung minoritas-minoritas Kristen dan Amerika Serikat.¹

Karena ingin mempertahankan identitas dan kemerdekaan agama mereka, umat Kristen sejak semula dengan gigih membela kemerdekaan nasional Libanon dan menentang usaha-usaha integrasi Libanon ke dalam federasi atau persatuan Arab yang lebih besar, lagi pula berusaha membatasi keterlibatannya dalam sengketa Arab-Israel. Sebaliknya umat Muslim menginginkan partisipasi yang lebih besar dalam kehidupan politik dunia Arab dan lebih terbuka untuk suatu federasi dengan negara-negara Arab lainnya.

Selama ini susunan politik Libanon mempunyai dasar konfesional dan pemerintahan didasarkan atas perimbangan antara kelompok-kelompok keagamaan itu. Kekuasaan dan kedudukan-kedudukan penting dalam negara dibagi antara mereka sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Susunan pemerintahan berdasarkan agama itu secara formal dimulai pada tahun 1861, ketika Pemerintah Usmanli Turki membentuk sanjak (daerah) otonom Libanon. Dalam Perang Dunia I sanjak itu dihapus, tetapi azasnya dihidupkan kembali oleh Perancis yang mendapatkan Suriah dan Libanon sebagai negeri mandat. Susunan konfesional itu bahkan diperkuat sebagai sarana yang paling baik untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan mengamankan kepentingan-kepentingan Perancis di Libanon dan Timur Tengah. Pada tahun 1936 dan 1938 misalnya peng-

1 Lihat H.B. Sharabi, *Governments and Politics of the Middle East in the Twentieth Century* (New York — London, 1963) hal. 135-147

adilan-pengadilan agama diakui oleh Pemerintah dan hukumnya diberi status hukum negara, dan sebagai akibatnya kedudukan pemimpin-pemimpin agama menjadi lebih kuat. ¹

Pada tahun 1943 ketika Libanon mendapatkan kemerdekaan dari Perancis, pemimpin-pemimpin umat Kristen dan umat Muslim membuat suatu persetujuan akomodasi yang dikenal sebagai Pakta Nasional. Persetujuan ini menyatakan persaudaraan seluruh rakyat dan menandakan kemerdekaan Libanon. Di satu pihak umat Kristen mengakui watak Arab Libanon dan melepaskan ikatan mereka dengan negara-negara Barat, di lain pihak umat Muslim berjanji akan membela kemerdekaan negeri dan melepaskan tuntutan mereka untuk menyatukannya dengan Suriah atau negara-negara Arab lainnya. Selanjutnya kedua golongan itu setuju untuk membagi kekuasaan dan kedudukan kedudukan penting sesuai dengan kekuatan numerik masing-masing pada waktu itu. Secara demikian umat Kristen mempunyai kedudukan yang lebih kuat, terutama karena Libanon menganut sistem pemerintahan presidensiil. Libanon menganut sistem demokrasi, tetapi parlemen selalu lemah dan kurang efektif karena kedudukan dominan Presiden dan susunan konfesionalnya itu. Presiden dipilih oleh parlemen tetapi tidak bertanggung jawab kepadanya dan dapat membuat undang-undang tanpa partisipasinya. ²

POKOK-POKOK SENGKETA

Pokok sengketa antar golongan di Libanon sekarang ini adalah sistem bagi kekuasaan itu. Golongan Muslim menuntut agar sistem itu ditinjau kembali karena merasa bahwa berkat laju pertumbuhan yang lebih tinggi mereka telah menjadi lebih banyak daripada golongan Kristen. Akan tetapi golongan Kristen menolak tuntutan itu dan berusaha untuk mempertahankan status quo yang jelas lebih menguntungkan mereka dan memberikan kedudukan dominan dalam pemerintahan kepada mereka. Pokok sengketa lain yang tahun-tahun belakangan ini sema-

¹ *Ibid.*, hal. 136

² Lihat George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs* (Ithaca, 1964), hal. 341

kin tampil ke muka ialah pembagian kembali pendapatan dan kekayaan nasional. Golongan miskin, yaitu sebagian besar umat Muslim, menuntut bagian kemakmuran yang lebih besar, tetapi golongan berada, kebanyakan umat Kristen, tidak bersedia melepaskan kepentingan-kepentingan mereka. Sementara itu sengketa menjadi lebih rumit dengan kehadiran setengah juta pengungsi Palestina dan organisasi-organisasi gerilyawan PLO di wilayah Libanon, yang memihak golongan Muslim. Golongan Kristen, biarpun mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-hak nasional mereka, kurang senang dengan kehadiran sekian banyak pengungsi itu. Khususnya mereka sangat tidak senang gerilyawan-gerilyawan menguasai kamp-kamp pengungsi dan merubahnya menjadi pangkalan-pangkalan militer. Mereka melihat PLO sebagai suatu negara dalam negara dan menyamakan kehadiran pasukan-pasukannya dengan pendudukan militer asing. Mereka juga sangat berkeberatan bahwa PLO menggunakan wilayah Libanon sebagai pangkalan aksinya melawan Israel dan secara demikian memancing serangan-serangan balasan, yang tidak hanya melanggar kedaulatan Libanon tetapi juga menimbulkan banyak kerusakan. Sebaliknya umat Muslim simpatik terhadap orang-orang Palestina dan mendukung PLO, antara lain karena berkat kehadiran dan bantuannya mereka menjadi lebih kuat terhadap umat Kristen. Dengan demikian gerilyawan-gerilyawan Palestina bukan saja pokok sengketa kanan-kiri melainkan juga pihak sengketa. Menjanjiknya gerakan mereka, terutama setelah Jordania menindak PLO dan mengusirnya dari wilayahnya, merupakan sumber keresahan di Libanon. Golongan kanan dan Angkatan Bersenjata Libanon sangat tidak senang dengan sikap dan kegiatan-kegiatan mereka. Pemerintah Libanon sendiri berkali-kali berusaha mengendalikan mereka seperti negara-negara Arab lainnya, tetapi selalu sia-sia, terutama akibat tekanan negara-negara itu. ¹

¹ Mengenai pokok-pokok sengketa antar golongan di Libanon lihat karangan "Land Without Leaders", *Newsweek*, 6 Oktober 1975; dan Eric Rouleau, "Lebanon's Absent State", *The Guardian*, 11 Oktober 1975

PERANG SAUDARA

Dengan demikian terjadi suatu polarisasi antara golongan Kristen kanan di satu pihak dan golongan Muslim kiri serta PLO di lain pihak. Golongan Muslim pada waktu yang sama mengecam negara sebagai pembela kepentingan golongan Kristen kaya dan menuntut suatu perombakan mendalam dalam masyarakat dan negara berupa pembagian kembali kekuasaan dan pendapatan secara yang adil, tetapi golongan Kristen menolaknya dan berusaha mempertahankan status quo. Setelah merasa lebih kuat berkat dukungan PLO, golongan Muslim kiri akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekerasan guna mendapatkan tuntutan mereka. Sebagai akibatnya bulan April 1975 mulailah perang saudara yang berlangsung sampai Oktober 1976.¹

Perang saudara itu menjadi berkepanjangan dan lebih sengit dengan adanya campur tangan asing di kedua pihak. Golongan Kristen menuduh Suriah, Irak, Libia dan PLO membantu golongan Muslim, sedangkan golongan Muslim menuduh Amerika Serikat dan Israel membantu golongan Kristen untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Palestina. Selain itu sementara negara Arab menuduh Israel telah mengobarkan perang saudara di Libanon untuk memecah pihak Arab dan melemahkannya. Tuduhan-tuduhan itu rupanya beralasan, paling tidak untuk sebagian. Yang jelas ialah bahwa PLO tidak hanya memberikan senjata kepada golongan Muslim kiri tetapi juga latihan militer, nasihat dan bimbingan. Sebaliknya golongan Kristen mendapatkan senjata dari agen-agen luar negeri dan memasukkannya lewat pantai yang mereka kuasai. Mereka juga mendapatkan bantuan militer dari Israel yang berkepentingan dengan dipertahankannya perimbangan kekuatan di negeri tetangganya itu dan kalau mungkin dengan kemenangan golongan Kristen. Akan tetapi adalah campur tangan Suriah yang paling mempersulit penyelesaian masalah Libanon.²

1 Tentang perang saudara di Libanon lihat lebih lanjut Abbad Kelidar dan Michael Burrell, *Lebanon: The Collapse of a State* (London, 1976); Frank Stokes, "The Civil War in Lebanon", *The World Today*, Januari 1976; dan David Waines, "Civil War in Lebanon", *International Perspectives*, Januari-Februari 1976

2 Lihat *Kompas*, 17 Nopember 1975; dan "Why the Lebanese Stopped Loving the Syrians", *The Economist*, 20 Maret 1976

INTERVENSI SURIAH

Sebagai negara tetangga yang menganggap Libanon vital bagi keamanan dan perekonomiannya, Suriah sejak semula mengikuti perang saudara itu dengan saksama dan berulang kali turun tangan untuk mengendalikannya demi kepentingan nasionalnya. Akan tetapi aliansinya berubah-ubah. Sampai Januari 1976 dia mendukung golongan kiri dan PLO untuk mencegah golongan Kristen mencapai kemenangan yang menentukan dan membentuk suatu pemerintah baru yang lebih menjauhkan diri dari negara-negara Arab lainnya. Sesudah itu dia ganti membantu golongan Kristen yang terdesak untuk mencegah golongan Muslim kiri mendapatkan kemenangan dan memaksakan suatu penyelesaian radikal, yang tidak hanya dapat mengobarkan kembali perang Arab-Israel, tetapi juga dapat menghancurkan atau mengurangi kemampuannya untuk mempengaruhi perkembangan di Libanon.

Menurut rencana perdamaian Suriah yang pada 22 Januari 1976 disetujui semua pihak dan dituangkan dalam suatu program pembaharuan 17 pasal yang diumumkan Pemerintah Libanon pada 14 Pebruari 1976, tiada pihak yang menang atau kalah dan sistem bagi kekuasaan Pakta Nasional tahun 1943 dipertahankan, tetapi umat Muslim mendapat bagian kekuasaan yang lebih besar, biarpun tidak sebesar tuntutan mereka.¹ Tetapi rencana perdamaian itu tidak dilaksanakan karena golongan Muslim kemudian menarik kembali persetujuan mereka. Mereka meneruskan ofensif mereka melawan golongan Kristen karena merasa akan segera mencapai kemenangan yang menentukan. Untuk mengamankan rencana perdamaian itu, Suriah terpaksa mengerahkan lebih banyak pasukan dan senjata berat. Oleh sebab golongan Muslim dan PLO memberikan perlawanan, maka terjadi pertempuran-pertempuran sengit di mana mereka mendapatkan pukulan-pukulan berat.

Namun Suriah tidak berhasil mencapai sasaran intervensinya itu karena negara-negara Arab lain segera turun tangan

¹ Lihat "Lebanon — A Fuse That's Well Alight", *The Guardian*, 25 Januari 1976; dan *Kompas*, 16 Pebruari 1976

untuk menghentikan pertempuran Arab lawan Arab. Liga Arab yang bersidang pada 8 Juni 1976 mengulurkan dua resolusi yang berseru agar tembak menembak dihentikan dan memutuskan untuk membentuk suatu Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab guna mengawasi genjatan senjata dan memulihkan keamanan serta perdamaian. Suriah setuju tetapi dengan syarat bahwa Pasukan itu hanya bersifat simbolis sedangkan tentara ekspedisinya tetap merupakan kekuatan dominan. ¹ Sementara itu golongan Kristen, antara lain berkat bantuan senjata Israel, berhasil memperbaiki kedudukan mereka dan melancarkan suatu ofensif balasan, yang berhasil merebut kembali daerah-daerah mereka dan menguasai kantong-kantong PLO di wilayah mereka. Kamp Palestina Jisr al Basha jatuh pada 29 Juni dan Tal Zaatar pada 12 Agustus 1976. ²

Dalam keadaan terdesak itu PLO berulang kali berseru kepada negara-negara Arab agar turun tangan dan mengadakan pertemuan puncak guna mencari jalan untuk menyelesaikan krisis Libanon yang mengancam kelangsungan perjuangan Palestina. Mula-mula seruan-seruan itu tidak ditanggapi secara serius, tetapi atas prakarsa Arab Saudi dan Kuwait pada 16-18 Oktober 1976 diadakan pertemuan puncak antara Arab Saudi, Kuwait, Libanon, Suriah, Mesir dan PLO. Sebagai hasilnya dicapai sepakat kata mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghentikan perang saudara dan memulihkan perdamaian antar golongan di Libanon. Rencana itu meliputi genjatan senjata; penarikan semua pasukan ke posisi masing-masing sebelum perang; konsolidasi Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab menjadi 30.000 orang untuk mengawasi genjatan senjata, penarikan pasukan-pasukan ke posisi-posisi semula, pengumpulan senjata-senjata berat, serta implementasi Persetujuan Kairo 1969, dan untuk memelihara keamanan; implementasi Persetujuan Kairo tahun 1969 itu; penyelenggaraan konperensi meja bundar semua golongan di Libanon untuk menyelesaikan sengketa mereka; pembentukan suatu dana Arab untuk pembangunan kembali Libanon; dan pembentukan suatu komite

1 Lihat *Indonesian Observer*, 2 Juni 1976; dan *Suara Karya*, 16 Juni 1976

2 Lihat *Kompas*, 24 Juni 1976; dan *Sinar Harapan*, 14 Agustus 1976

ANALISA

gabungan Arab Saudi — Kuwait — Mesir Suriah yang harus menyelesaikan tugasnya sehubungan dengan implementasi Perseetujuan Kairo itu dalam 90 hari sesudah gencatan senjata. ¹ Perseetujuan Riyadh itu kemudian dikukuhkan oleh Konperensi Puncak Arab di Kairo (25-26 Oktober 1976) yang juga mengesahkan 20.000 pasukan Suriah sebagai bagian Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Arab, mengatur pembiayaannya dan menandatangani bahwa gerakan perlawanan Palestina di Libanon harus dipertahankan tetapi juga mematuhi Perseetujuan Kairo. ² Sebagai akibatnya, gencatan senjata menjadi lebih mantap dan timbul harapan bahwa dalam waktu yang dekat sengketa antar golongan di Libanon dapat diselesaikan secara damai. Akan tetapi harapan itu ternyata sia-sia, khususnya karena rencana penyelesaian Riyadh itu hanya dilaksanakan setengah-setengah. Pihak-pihak sengketa tidak bersedia menyerahkan senjata-senjata berat mereka dan bahkan meningkatkan persenjataan mereka masing-masing.

SURIAH LAWAN GOLONGAN KRISTEN

Karena berbagai alasan aliansi antara Suriah dan golongan Kristen Libanon lambat laun berubah menjadi permusuhan. Pertama, tentara Suriah memerintahkan kepada golongan Kristen Libanon untuk meletakkan senjata tetapi tidak memberikan perintah serupa kepada gerilyawan-gerilyawan Palestina. Pemimpin-pemimpin Kristen menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka hanya akan menyerahkan senjata-senjata mereka setelah gerilyawan-gerilyawan Palestina melakukannya. Kedua, golongan Kristen berusaha meletakkan dasar untuk membentuk negara mereka sendiri di wilayah yang mereka kuasai, tetapi Suriah menentangnya karena memperjuangkan kesatuan, ketuhanan wilayah dan kemerdekaan Libanon. Ketiga, dalam perang saudara, ketika terdesak oleh golongan kiri dan PLO, golongan Kristen minta dan mendapat bantuan militer besar-besaran dari Israel, sehingga mampu mematahkan ofensif musuh

1 Lihat *Suara Karya*, 20 Oktober 1976

2 Lihat *Antara*, 26 Oktober 1976

dan mengambil alih inisiatif. ¹ Secara demikian terjalin hubungan baik dengan Israel yang makin lama makin kuat. Suriah berulang kali menuntut kepada mereka agar memutuskan hubungan itu, tetapi dianggap sepi. Beberapa waktu yang lalu Camille Chamoun, ketika didesak Presiden Assad untuk memilih antara negara-negara Arab dan Israel, menjawab memilih Israel.

Akhirnya Presiden Assad memutuskan untuk menundukkan golongan Kristen dengan kekerasan. Bentrokan-bentrokan antara tentara Suriah dan pasukan-pasukan Kristen, yang sejak Pebruari 1978 menjadi semakin banyak, pada 30 September 1978 meningkat menjadi pertempuran sengit. Tentara Suriah mengerahkan senjata-senjata berat, termasuk ratusan tank dan artileri 240 mm untuk menggempur daerah Kristen di Beirut Timur. Dalam satu minggu pasukan-pasukan Suriah melepaskan lebih dari 40.000 tembakan meriam, yang menghancurkan 37.000 rumah dan banyak minta korban jiwa. Mereka juga mengenakan suatu blokade ketat, sehingga daerah itu segera kekurangan pangan dan air. Akan tetapi Suriah tidak berhasil mencapai sasarannya. Golongan Kristen memberikan perlawanan gigih dan bersumpah akan terus bertempur sampai tentara Suriah angkat kaki dari Libanon. ² Sementara itu Israel meningkatkan bantuan senjatanya sambil mengulangi peringatannya tidak akan membiarkan Suriah membinasakan umat Kristen. Selain itu Amerika Serikat dan Perancis mendesak Suriah agar menghentikan tembak menembak. Demikianpun Dewan Keamanan pada 6 Oktober 1978 mengeluarkan sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata. Di bawah tekanan-tekanan itu Presiden Assad pada 7 Oktober mencapai sepakat kata dengan Presiden Sarkis untuk menghentikan tembak menembak dan memerintahkan gencatan senjata. Dengan demikian berakhirlah pertempuran antara Suriah dan golongan Kristen Libanon, biarpun di sana sini masih terjadi tembak menembak. ³

1 Lihat "Israel Secretly Joins the War in Lebanon", *Time*, 13 September 1976

2 Lihat "The Blasting of Beirut", *Time*, 16 Oktober 1978; dan David Hirst, "Phalangists Ready to Fight for Forty Years", *The Guardian*, 15 Oktober 1978

3 Lihat *Kompas*, 9 Oktober 1978

RENCANA PENYELESAIAN 8 PASAL

Atas prakarsa Presiden Sarkis, Libanon dan enam negara Arab yang menyumbangkan pasukan bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab mengadakan suatu pertemuan tingkat Menlu di Beit Eddine untuk membicarakan krisis Libanon itu dan menghasilkan suatu rencana penyelesaian delapan pasal, yaitu perlucutan senjata semua kelompok militer dan larangan membawa senjata; pelaksanaan resolusi-resolusi KTT Riyadh dan Kairo; mengakhiri kampanye propaganda dan melarang semua media massa seperti stasiun radio. Surat kabar dan sebagainya yang tidak sah; penjadwalan pembentukan tentara nasional Libanon yang berimbang untuk mengambil alih tugas Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab; pelaksanaan detente nasional guna menjamin kesatuan negara; larangan terhadap kontak-kontak dengan Israel; dan pembentukan sebuah komisi Arab Saudi — Suriah — Kuwait untuk menangani masalah-masalah yang timbul. Dalam komunike yang mengumumkan rencana itu juga ditandaskan perlunya menegakkan kekuasaan Pemerintah Libanon atas seluruh negeri dan menyingkirkan semua hambatan. ¹ Seperti kita lihat kemudian, konperensi rupanya juga mencapai sepakat kata untuk mengganti pasukan-pasukan Suriah di beberapa tempat strategis di Beirut Timur dengan pasukan-pasukan Arab Saudi guna mencegah berkobarnya kembali pertempuran-pertempuran. Sebagai akibatnya gejatan senjata menjadi lebih mantab. Selain itu rupanya juga diputuskan bahwa 10.000 pasukan Suriah di Libanon akan ditarik dan diganti dengan 5.000 pasukan Yordania, 1.500 pasukan Arab Saudi dan 3.500 orang pasukan Uni Emirat Arab. ²

Yang perlu dicatat dalam hubungan ini ialah bahwa rencana penyelesaian itu memuat juga suatu ketentuan bahwa resolusi-resolusi KTT Riyadh dan Kairo harus dilaksanakan dan bahwa proses pembentukan tentara nasional Libanon harus dipercepat agar dapat segera menggantikan Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab. Demikianpun keputusan untuk mengurangi jumlah

1 Lihat *Suara Karya*, 19 Oktober 1978

2 Lihat *The Straits Times*, 20 Oktober 1978

pasukan Suriah. Setelah bertugas lebih dari dua tahun di Libanon, Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab itu dilihat sebagai suatu tentara pendudukan oleh banyak orang Libanon. Dan kehadiran pasukan-pasukan Suriah tidak dapat diterima lebih lama oleh golongan Kristen setelah terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka.

Semuanya itu berarti bahwa pertama-tama kekuasaan Pemerintah Libanon harus ditegakkan di seluruh negeri dan dengan maksud itu proses pembentukan tentara nasional harus dipercepat. Tanpa adanya tentara nasional Libanon yang kuat yang dapat menegakkan kekuasaan Pemerintah, segala rencana penyelesaian tidak akan dapat dilaksanakan, khususnya karena terdapat banyak milisia baik kanan maupun kiri yang tidak senang menyerahkan senjata-senjata mereka yang sejauh ini berarti kekuasaan atau perlindungan. Mereka itu harus dipaksa melakukannya.

HAMBATAN-HAMBATAN

Namun dapat dipersoalkan apakah rencana penyelesaian delapan pasal itu akan lebih berhasil daripada rencana-rencana perdamaian sebelumnya. Semua fraksi sayap kiri menyatakan menerimanya, tetapi Partai Liberal Nasional Camille Chamoun menganggapnya sepi dan Partai Phalangis Pierre Gemayel mengatakan bahwa rencana itu "kabur dan masih perlu penjelasan".¹ Rencana itu bertolak dari asumsi bahwa kesatuan, keutuhan wilayah dan kemerdekaan Libanon harus dipertahankan, sedangkan golongan Kristen umumnya memperjuangkan pemecahan Libanon dan pembentukan negara Kristen sendiri atas wilayah yang sejauh ini dikuasai oleh mereka. Kenyataannya Libanon telah pecah menjadi dua dan golongan Kristen berkuasa atas wilayah mereka. Dan seperti kita lihat di atas, Israel mendukung perjuangan mereka itu. Oleh sebab itu diragukan bahwa memutuskan hubungan mereka dengan negara itu ataupun golongan Kristen bersedia, menyerahkan senjata-senjata mereka kepada Pasukan Pemelihara Perdamaian Arab dan

1 Lihat "Ruin is No Policy", *The Economist*, 14 Oktober 1978

ANALISA

membiarkan tentara nasional Libanon menguasai wilayah mereka. Juga dapat dipersoalkan apakah PLO akan bersedia menyerahkan senjata-senjatanya. Bahkan dapat diperkirakan bahwa PLO tidak akan bersedia melakukannya karena menyerahkan senjatanya akan berarti kehilangan kemerdekaan yang masih dinikmatinya.

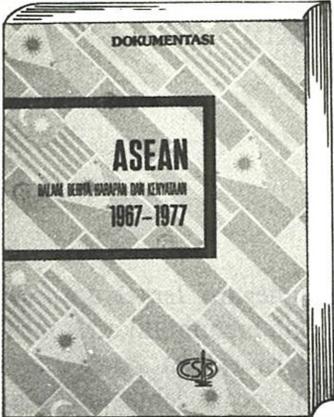
Dengan demikian terdapat dua pendirian yang bertentangan secara diametral. Golongan Muslim Libanon, PLO dan negara-negara Arab berpendapat bahwa Libanon harus tetap satu dan Arab, sedangkan golongan Kristen yang didukung Israel memperjuangkan pembagian Libanon dan pembentukan negara Kristen tersendiri. Sebagai akibatnya rencana perdamaian delapan pasal itu paling tidak sangat sulit dilaksanakan, khususnya karena golongan Kristen merasa memiliki kemampuan untuk mewujudkan cita-cita mereka dan dapat mengandalkan bantuan Israel.

JALAN TENGAH

Kita belum tahu apakah masalah Libanon akan diselesaikan sesuai dengan pendirian Arab atau pendirian golongan Kristen Libanon itu. Yang jelas ialah bahwa jika kedua pihak berkeras untuk membela pendiriannya masing-masing, pertempuran-pertempuran akan berkobar kembali. Untuk menghindari kemungkinan ini dan mencapai suatu penyelesaian damai, dapat ditempuh jalan tengah, yaitu pembentukan suatu federasi dua negara bagian. Mengingat komposisi rakyat Libanon dari dua umat yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan kepribadiannya sendiri, perlunya koeksistensi damai dan kerjasama antara mereka, dan adanya tekanan-tekanan dunia Arab dan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat, mungkin pembentukan dua negara bagian yang akan merupakan satu negara federal merupakan satu-satunya penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak. Tercapainya perdamaian Arab-Israel yang memungkinkan orang-orang Palestina untuk kembali ke Palesti-

na kiranya akan mempermudah penyelesaian sengketa antar golongan di Libanon itu. Ratusan ribu pengungsi Palestina itu dan PLO merupakan salah satu pokok sengketa dan pihak sengketa yang menjadikan sengketa itu lebih rumit dan memper-sulit penyelesaiannya.

BUKU BARU!



**ASEAN DALAM BERITA, HARAPAN DAN KENYATAAN
1967—1977.**

Disusun oleh CSIS, memuat langkah-langkah para pemimpin Indonesia, Malaysia, Muangthai, Pilipina dan Singapura dalam mempersiapkan pembentukan suatu organisasi regional di Asia Tenggara dan perkembangan organisasi itu sejak berdiri tanggal 8 Agustus 1967 sampai Maret 1978 secara menyeluruh.

Berita-berita dan peristiwa-peristiwa ASEAN dapat ditemui di dalam penyajian buku ini, *harapannya* akan kita temui/terungkap di dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-persetujuan dan ataupun pernyataan-pernyataan ASEAN, sedangkan *kenyataannya* terungkap di dalam apa yang telah dihasilkan oleh organisasi tersebut.

Buku ini dilengkapi pula dengan lampiran-lampiran yang memuat data politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta indeks personalia dan masalah.

Penting sekali dan wajib dimiliki para peneliti, lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah, perpustakaan-perpustakaan, mahasiswa dan umum!

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES, tebal 634 hal., kertas HHI, harga Rp. 4.500,—

Persediaan terbatas! Dapatkanlah segera di toko-toko buku atau pesan langsung disertai pembayaran tambah ongkos kirim 15% ke :

BIRO PUBLIKASI CSIS, Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telp. 349489.